

SKRIPSI

WANTI CHOLIFAH

**TANGGUNG GUGAT PRODUSEN KOSMETIKA
YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN**



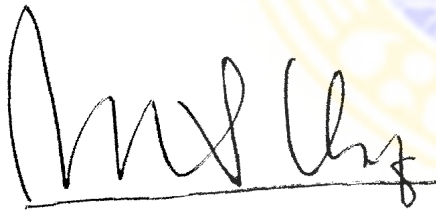
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

TANGGUNG GUGAT PRODUSEN KOSMETIKA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN

SKRIPSI

**Diajukan sebagai penulisan akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum
untuk memenuhi syarat - syarat mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Hj. Moerdiati, S.H. M.S.

NIP. 130 287 031

Penulis,



Wanti Cholifah

NIM. 039714483

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

untuk berhati-hati (duty of care) sehingga dapat mempertinggi mutu kosmetika dan pada akhirnya bisa mengurangi jumlah konsumen yang mengajukan tuntutan ganti rugi kepada produsen.

2. Saran

- a. Seharusnya pemerintah lebih tegas memberlakukan sanksinya kepada produsen yang melanggar ketentuan pasal 8 ayat (1) UUPK yaitu ketentuan tentang perbuatan yang dilarang dalam suatu produksi bagi pelaku usaha dengan demikian produsen lebih berhati-hati dalam memproduksi sehingga dapat memperkecil kemungkinan timbulnya kerugian pada konsumen. selain itu, alasan yang digunakan oleh produsen untuk lepas dari tanggung gugat sebagaimana tertuang dalam pasal 27 huruf e UUPK yaitu lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan, seharusnya tidak diberlakukan pada kasus kosmetika sebab efek samping pemakaian kosmetika tidak seketika setelah dipakai tetapi dapat terjadi bertahun-tahun kemudian dimana waktunya tidak dapat ditentukan sehingga apabila efek samping itu terlihat setelah pemakaian lebih dari 4 (empat) tahun maka produsen harus tetap bertanggung gugat atas tuntutan konsumen.
- b. Seyogyanya BPOM melakukan pengawasan secara penuh terhadap produk yang sudah terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Bahkan BPOM seharusnya menindak lebih tegas terhadap produk yang tidak terdaftar dan mengenakan sanksi terhadap produsen kosmetika yang belum mempunyai izin usaha

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Produsen bertanggung gugat atas kosmetika yang dihasilkannya apabila produk tersebut merugikan kesehatan konsumen. Sebelum ada UU Perlindungan Konsumen dasar hukum yang biasa digunakan adalah pasal 1365 BW yaitu perbuatan melanggar hukum. Dalam pelaksanaannya, terdapat kesulitan bagi konsumen apabila menerapkan pasal ini yaitu konsumen sebagai penggugat harus membuktikan “kesalahan” yang dilakukan oleh produsen sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1865 BWjo. pasal 163 HIR. Dengan hadirnya UUPK, mereka dapat menggunakan pasal 19 untuk menggugat produsen dimana melalui pasal 28 mengalihkan Beban pembuktian yang semula dibebankan kepada konsumen demi hukum berpindah ke produsen..
- b. Untuk memantau kegiatan produsen maka diadakan pengawasan. Pengawasan terhadap produsen kosmetika ini sangat penting sebagai tindakan preventif agar kosmetika yang dihasilkan tidak sampai merugikan konsumen. Oleh karena itu pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses produksi sampai beredar di pasaran dan dilakukan oleh berbagai kalangan yaitu pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan swadaya masyarakat Dengan demikian, produsen benar-benar akan menjalankan kewajibannya

